

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)**



**OLEH:**

**FADEL MUHAMMMAD**

**B 111 13 131**

**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2017**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
(PILKADA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana Departemen Hukum Tata Negara  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH:**

**FADEL MUHAMMAD**

**B111 13 131**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)**

disusun dan diajukan oleh:

**FADEL MUHAMMAD**

**B111 13 131**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Senin, 14 Agustus 2017  
dan Dinyatakan Diterima

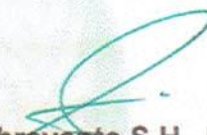
**Panitia Ujian**

**Ketua**



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si  
NIP.19640824 199103 2 002

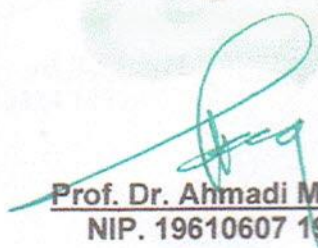
**Sekretaris**



Dr. Romi Librayanto S.H., M.H  
NIP. 19781017 200501 1 001

**A.n. Dekan**

**Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.  
NIP. 19610607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **FADEL MUHAMMAD**  
Nomor Induk : **B 111 13 131**  
Departemen : **HUKUM TATA NEGARA**  
Judul : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin.

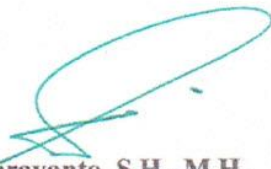
Makassar, Juli 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.  
NIP. 19640824 199103 2 002

Pembimbing II



Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.  
NIP. 19781017 200501 1 001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: FADEL MUHAMMAD
Nomor Pokok	: B11113131
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2017

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan.

Prof. Dr. Ahmadi Miru,SH.,MH  
NIP. 19610607 198601 1 003

## **ABSTRAK**

**FADEL MUHAMMAD, B111 13 131, dengan judul skripsi “Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si., sebagai Pembimbing I dan Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU), apakah sesuai dengan syarat PSU yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015. Serta mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan PSU, mengingat di beberapa daerah Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU lebih dari satu kali.

Penelitian ini bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui riset kepustakaan yakni peraturan perundang-undangan terkait dan Putusan Mahkamah Konstitusi di 3 daerah yaitu Kabupaten Muna, Kabupaten Halmahera, dan Kabupaten Mamberamo. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1.) Alasan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan PSU digolongkan ke dalam 2 kelompok yaitu alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU yang sesuai dengan syarat yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 dan alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU yang tidak sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015. 2.) Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan PSU dikarenakan keberatan yang disampaikan dianggap tidak cukup bukti, tidak beralasan menurut hukum, serta demi memberikan kepastian hukum agar tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.

## **ABSTRACT**

**FADEL MUHAMMAD, B111 13 131, with the title of "Legal Analysis of Re-Voting Election in Pilkada". Under guidance Ms. Marwati Riza, as First Advisor and Mr. Romi Librayanto, as Supervisor II.**

This study aims to determine the reasons of the Constitutional Court in order to re-vote (PSU), whether in accordance with the requirements of the PSU that has been regulated in Law no. 1 Year 2015. And knowing the reason the Constitutional Court did not order the PSU, considering in some areas the Constitutional Court ordered the PSU more than once.

This research is normative with data collecting technique done through literature research that is related legislation and Decision of Constitutional Court in 3 area that is Regency of Muna, Regency of Halmahera and Regency of Mamberamo. In addition, the author also conducts library research through data and books related to the research topic. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively which then presented descriptively.

The results of this study are: 1.) The reason the Constitutional Court in order to be classified into two groups of PSU is the reason the Constitutional Court ordered the PSU in accordance with the requirements set in Law no. 1 of 2015 and the reason the Constitutional Court ordered the PSU which is not in accordance with the conditions set forth in Law no. 1. The Constitutional Court does not instruct the PSU because the objection submitted is considered insufficient evidence, unreasonable according to law, and to provide legal certainty in order not to interfere with the process of governance in the area.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti ajarannya hingga akhir kelak, sehingga Penulis dapat menyelesaikan segala kendala dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum terhadap Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat akademis yang diwajibkan dalam pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua Penulis, ayahanda Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin M. Ag., serta Ibunda Dra. Nirwana, yang dengan penuh kasih sayang telah melahirkan, membesarkan, mengayomi, mendidik dan terus memberikan segala bentuk dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang dengan harapan agar kelak dikemudian hari penulis dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa. Untuk sementara, ini mungkin dapat menjadi hadiah untuk kedua orang tua penulis meskipun tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa-jasa yang telah mereka berikan selama ini.

Terima kasih kepada saudara-saudara saya, Fajrul Ilmy Darussalam S. Fil., Mitfah Farid Darussalam S. IP., Fadil Muhammad Darussalam S.



Kel., serta fadhillah Arhamy Darussalam yang telah membantu dan mendoakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar saya yang telah banyak memberikan dan memotivasi Penulis dalam menjalani kehidupan ini.

Pada kesempatan ini pula perkenankanlah kiranya Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan.
3. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. dan bapak Dr. Romi Librayanto S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM., Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., dan Ibu Eka Merdekawati, S.H., M.H., selaku tim Penguji. Terima kasih atas kritikan serta masukan untuk skripsi ini yang sangat bermanfaat untuk Penulis.
5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi dosen yang kaya akan ilmu, pengalaman, dan nasehat-nasehat selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Kepada Penasihat Akademik Penulis, Ibu Amaliyah, S.H., M.H., yang senantiasa memotivasi Penulis untuk terus meningkatkan nilai IP di setiap semesternya hingga titik penulisan skripsi.

7. Para staff akademik dan seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas kinerja dan bantuan untuk Penulis selama ini.
8. Terima kasih kepada kawan-kawan angkatan ASAS 2013 tanpa terkecuali, yang telah mengisi serta menemani masa perkuliahan Penulis serta sukses menyelenggarakan baik itu Inaugurasi ASAS 2013 hingga penyelenggaraan Pembinaan Mahasiswa Baru (PMH) dan tetap berjuang kawan-kawan ASAS 2013 untuk menegakkan hukum dimuka bumi ini.
9. Terima kasih kepada keluarga Besar ALSA LC UNHAS serta seluruh pengurus periode 2014-2015 yang telah memberi pengalaman organisasi bagi Penulis.
10. Terima kasih keluarga besar LeDHaK Unhas yang juga telah memberikan pengalaman organisasi bagi Penulis dan terkhusus teman-teman yang seangkatan Aldi, Yunus, Riski, Rani, Sinrang, Mizwar, Robi, Cikal, yang telah dengan senang hati berbagi ilmu dengan penulis.
11. Terima kasih kepada teman-teman KKN Reguler Gel. 93 Desa Bonto Rannu, Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng yang telah menjadi keluarga bagi penulis selama menjalani program KKN.
12. Terima kasih kepada anak-anak *Tampan?*, Adi Matta S.H., Akbar S.H., Alip, Azharul S.H., Ansar S.H., Cikal, Caki, Dirwan gosling, Dinul BZ S.H., Eco, Pikri, Firman, Farhan, Fatur, Gusti, Hirwan S.H., Taufik S.H., yang telah mempercayakan penulis untuk men-tender baju Tampan?, dan semoga mempercayakan kembali kepada penulis untuk men-tender merchandise lainnya.
13. Terima kasih kepada teman yang selalu menemani Penulis untuk selalu meramaikan warkop dan perpustakaan serta berbagi cerita,

Akbar S.H., dengan salamnya, Alip dengan he'em nya, Pikri dengan standup comedy, Dirwan dengan prospek jangka panjangnya, serta zaki dengan wanita penarinya.

14. Dan terakhir terima kasih kepada teman-teman bahkan keluarga yang tak sempat Penulis tuliskan, mungkin terkendala di ingatan Penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian ucapan terima kasih ini penulis buat. Mohon maaf yang terdalam jika penulisan nama dan gelar tidak sesuai. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalasnya, aamiin.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan senang hati akan diterima segala saran dan kritikan yang bersifat membangun.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pemilihan Kepala Daerah.....	9
1. Landasan Konstitusional.....	9
a. Undang-Undang Dasar NRI 1945.....	9
b. Undang-Undang/Perpu.....	9
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum.....	14
2. Definisi Pemilihan Kepala Daerah .....	14
3. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah .....	15
a. Tahapan Persiapan .....	15
b. Tahapan Penyelenggaraan .....	15
B. Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada.....	16
1. Definisi Pemungutan Suara Ulang .....	16
2. Syarat Pemungutan Suara Ulang .....	17
C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	20
1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945.....	20

2. Berdasarkan Undang-Undang Pilkada.....	21
D. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi .....	22
1. Para pihak dan Objek .....	23
2. Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Pihak Terkait.....	25
3. Pemeriksaan Perkara .....	28
a. Pemeriksaan Pendahuluan .....	28
b. Pemeriksaan Persidangan .....	28
c. Alat Bukti .....	29
d. Keterangan Pihak lain .....	31
e. Persidangan Jarak Jauh.....	31
f. Putusan Sela .....	32
4. Putusan Mahkamah .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Tipe Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Bahan Hukum .....	35
D. Analisis Bahan Hukum .....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) .....	38
A.1. Kabupaten Muna.....	39
a. Pertimbangan Hakim .....	39
b. Kesimpulan dari Pertimbangan Hakim .....	45
A.2. Kabupaten Mamberamo.....	47
a. Pertimbangan Hakim .....	47
b. Kesimpulan dari Pertimbangan Hakim .....	53
A.3. Kabupaten Halmahera Selatan.....	54
a. Pertimbangan Hakim .....	54
b. Kesimpulan Pertimbangan Hakim .....	57

B. Alasan Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) .....	59
B.1. Kabupaten Muna .....	59
a. Pertimbangan Hakim .....	59
b. Kesimpulan Pertimbangan Hakim .....	64
B.2. Kabupaten Mamberamo .....	64
a. Pertimbangan Hakim .....	64
b. Kesimpulan Pertimbangan Hakim .....	66
B.3. Kabupaten Halmahera Selatan .....	67
a. Pertimbangan Hakim .....	67
b. Kesimpulan Pertimbangan Hakim .....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 Ayat (2) mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jika demikian halnya maka pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kata 'demokratis' kemudian menimbulkan dua penafsiran di tengah masyarakat, yaitu apakah pemilihan dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Jika merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur terkait tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Undang-Undang tersebut hanya mengamanahkan bahwa terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang. Oleh karena itu penulis merujuk pada Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, maka

dapat ditemukan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung.

Selanjutnya Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Sementara itu dalam bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Setiap lembaga peradilan tersebut mempunyai kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ataupun dalam Undang-Undang. Namun pada bagian ini penulis hanya berfokus pada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 diatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

---

<sup>1</sup> Dalam menggolongkan suatu negara sebagai negara hukum, setidaknya memenuhi unsur-unsur negara hukum. Secara umum, A.V Dicey dan Julius Stahl telah mengemukakan unsur-unsur negara hukum. Dapat dilihat dalam buku Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press: Malang, hlm.49-57. Lihat juga Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, UI-Press: Jakarta, hlm.42-46. Serta lihat juga Abdul Mukhtie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press: Malang, hal.31-33.



Dengan demikian ada 4 (empat) kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Namun hadirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 memberikan kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Hal ini tercatat dalam Pasal 157 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut penulis, ketentuan ini merupakan jaminan bagi setiap warga negara dalam akses memperoleh kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut pilkada) merupakan perwujudan dari Pasal 1 Ayat (2) undang-Undang Dasar. Melalui pilkada, rakyat suatu daerah dapat menentukan siapa yang akan menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pilkada, harus dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil demi menjaga kemurnian kedaulatan rakyat.

Dalam pelaksanaan pilkada, terdapat kemungkinan terjadinya sengketa. Dimana sengketa tersebut dapat disebabkan beberapa hal,

mulai dari data pemilih tetap yang tidak valid, lolosnya pasangan bakal calon menjadi pasangan calon padahal tidak memenuhi verifikasi persyaratan, politik uang, paksaan untuk memilih salah satu pasangan calon, pemberian hak suara kepada orang yang tidak berhak, hingga manipulasi penghitungan hasil perolehan suara.<sup>2</sup> Berbagai penyebab sengketa tersebut dapat dijumpai dalam setiap pelaksanaan pilkada mulai dari Sabang hingga merauke. Keadaan yang demikian tentu saja memengaruhi bahkan mencemari kemurnian suara rakyat hingga bisa saja mengakibatkan pemimpin di daerah mereka tidak sesuai dengan pilihan mereka.

Akibatnya pada setiap akhir dari pelaksanaan pilkada sering terjadi ketidakpuasan pasangan calon terhadap hasil penghitungan suara dalam pilkada. Mereka (pasangan calon kepala daerah) yang tidak terpilih menduga telah terjadi pelanggaran atau kecurangan sehingga berujung pada gagalnya pasangan calon tersebut menjadi kepala daerah. Pada akhirnya kenyataan itu membawa pasangan calon kepala daerah untuk mengajukan gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Langkah tersebut dilakukan mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap permasalahan yang timbul (termasuk sengketa dalam pilkada) harus diselesaikan berdasarkan hukum.

---

<sup>2</sup> Rahmat Hollyzon MZ dan Sri Sundari, 2015, *Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna*, Bestari: Jakarta, hlm.36

Sejak beralihnya kewenangan memutus perselisihan sengketa pilkada dari Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK), tercatat Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima sebanyak 849 perkara.<sup>3</sup> Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan berbagai macam putusan terkait perkara-perkara tersebut. Salah satu putusan MK terkait perkara-perkara tersebut yaitu perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang.

MK telah mengeluarkan putusan serupa (pemungutan suara ulang) untuk beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Jawa Timur, Pandeglang Banten, Manado, hingga Merauke. Tentunya dengan dikeluarkannya putusan MK akan menimbulkan akibat hukum, bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan. Akan tetapi, jika kita melihat putusan terkait (dalam hal ini perintah pemungutan suara ulang) akan memunculkan potensi masalah. Terutama jika pemungutan suara ulang tersebut diulang lebih dari satu kali.

Pemungutan suara ulang yang dilakukan lebih dari satu kali terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya yang terjadi di Muna. Pilkada Muna diikuti oleh 3 pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1 Rusman Emba dan Abdul Malik Ditu (dikenal dengan akronim Rumah Kita), nomor urut 2 Arwaha Edy Saputra dan La Ode Samun, dan nomor urut 3 yaitu Baharuddin dan La Pili (dikenal dengan dokter Pilihanku). Pada pilkada Muna tanggal 9 Desember 2015 dimenangkan oleh

---

<sup>3</sup> [www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=5](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=5), diakses pada 23 Januari 2017, Pukul 21.14 WITA

pasangan nomor urut 3 yaitu Baharuddin dan La Pili. Akan tetapi setelah itu digugat oleh pasangan calon nomor urut 1 yaitu Rusman emba dan Abdul Malik Ditu ke Mahkamah Konstitusi.

Setelah disidangkan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan berupa perintah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 3 TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha 1, TPS 4 Wamponiki, dan TPS 1 Desa Marobo. Hasil dari pemungutan suara ulang ini dimenangkan oleh nomor urut 1. Akan tetapi terhadap hasil tersebut, keberatan diajukan kembali oleh pasangan nomor urut 3 ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan ditemukan kecurangan yang dilakukan pasangan calon nomor urut 1. Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan keberatan tersebut dan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang jilid II di 2 TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha 1, dan TPS 4 Wamponiki.

Setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang kedua, KPU kemudian menyampaikan laporan terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang kedua kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam laporan tersebut, masih terdapat keberatan-keberatan yang disampaikan para pihak terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan akhir. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga tidak terdapat lagi upaya hukum atas putusan tersebut.

Berdasarkan dengan uraian latar belakang di atas, maka isu hukum yang akan diteliti adalah kejelasan terkait pengaturan pengulangan pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Hukum terhadap Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dikembangkan dan diuraikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah?
2. Mengapa Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah.
- b. Untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan

Kepala Daerah (Pilkada). Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi kepada pembaca mengenai hal-hal yang terkait alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa secara umum dan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya mengenai pengulangan Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pemilihan Kepala Daerah**

##### **1. Landasan Konstitusional**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan kepala daerah tercantum dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah tersebut berada pada bab tentang pemerintahan daerah.<sup>4</sup> Adapun terkait sistem dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang.

- b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang.

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dianggap perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan

---

<sup>4</sup> Dengan demikian, menurut penulis pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam rezim pemilu. Namun, terdapat juga pendapat lain yang memasukkan pemilihan kepala daerah ke dalam rezim pemilu, seperti yang dikemukakan oleh Mukthie Fadjar, 2013, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi*, Setara Press: Malang, hlm.35.

perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan daerah, maka kemudian dibentuk dan disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014). Pada Pasal 59 Ayat (1) UU 23 Tahun 2014, diatur bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.<sup>5</sup> Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa kepala daerah yang dimaksud yaitu untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut walikota.<sup>6</sup> Adapun untuk mengisi jabatan kepala daerah diatur dalam Pasal 62 bahwa ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang.

2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi.<sup>7</sup> Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

<sup>6</sup> Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

<sup>7</sup> Konsideran Menimbang Perppu No. 1 Tahun 2014



Selain berdasarkan alasan tersebut di atas, terdapat juga pertimbangan mengenai kepentingan yang memaksa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang didalamnya memuat tentang persyaratan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang ini, pada Pasal 1 diatur bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut Perppu No. 1 Tahun 2014) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Hal ini sesuai dengan amanat dari UU 23 Tahun 2014 yang memerintahkan bahwa terkait dengan ketentuan pemilihan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang.<sup>8</sup>

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>8</sup> Pasal 62 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang ini berisi sejumlah perubahan dari Undang-Undang sebelumnya (UU No. 1 Tahun 2015). Perubahan tersebut dilakukan karena dianggap masih menyisahkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang sebelumnya, sehingga dianggap perlu disempurnakan.<sup>9</sup> Salah satu perubahan yang dilakukan dari UU sebelumnya adalah terkait lembaga yang menangani perkara perselisihan hasil pemilihan. Jika dalam UU sebelumnya penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan ditangani oleh Pengadilan Tinggi yang ditetapkan Mahkamah Agung, maka pada UU No. 8 Tahun 2015 perkara perselisihan hasil pemilihan ditangani oleh badan peradilan khusus. Namun, jika badan peradilan khusus yang dimaksud belum dibentuk maka perkara perselisihan penetapan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>10</sup>

Selain itu, masih terdapat perubahan-perubahan lainnya berupa penambahan ataupun penghapusan beberapa ketentuan. Dengan demikian ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

#### 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

---

<sup>9</sup> Penjelasan UU No. 8 Tahun 2015

<sup>10</sup> Pasal 157 UU No. 8 Tahun 2015

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang ini sebagai penyempurnaan beberapa ketentuan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015. Salah satu perubahan yang dilakukan yaitu mengenai batas waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang sebelumnya (UU No. 8 Tahun 2015) mengatur bahwa peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.<sup>11</sup> Sedangkan pada UU ini (UU No. 10 tahun 2016), peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.<sup>12</sup>

6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

---

<sup>11</sup> Pasal 157 Ayat (5) UU No. 8 tahun 2015

<sup>12</sup> Pasal 157 Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016

Berdasarkan Undang-Undang ini diuraikan beberapa hal diantaranya mengenai tugas KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota, sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu diatur juga tugas dan kewenangan penyelenggara pemilihan umum pada pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga dapat terlihat perbedaan tugas kewenangan penyelenggara dalam setiap agenda pemilihan umum.

#### c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

UU No. 1 Tahun 2015 memerintahkan agar beberapa hal diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.<sup>13</sup> Oleh karena itu, kemudian dibentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2016.

## **2. Definisi Pemilihan Kepala Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil

---

<sup>13</sup> Konsideran Menimbang Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

### **3. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan kepala daerah terdiri dari dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Adapun tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah yang dimaksud sebagai berikut:

a. Tahapan persiapan meliputi:<sup>14</sup>

- 1) Perencanaan program dan anggaran;
- 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
- 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemilihan;
- 4) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- 5) Pembentukan Panwas kabupaten/kota, panwas kecamatan, PPL, dan pengawas TPS;
- 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
- 7) Penyerahan daftar potensial pemilih; dan
- 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

b. Tahapan penyelenggaraan meliputi:<sup>15</sup>

- 1) Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- 2) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- 3) Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
- 4) Penetapan pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- 5) Pelaksanaan kampanye;

---

<sup>14</sup> Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015

<sup>15</sup> Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015

- 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
- 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 8) Penetapan calon terpilih;
- 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
- 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan hasil perbaikan dari tahapan yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

## **B. Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah**

### **1. Definisi Pemungutan Suara Ulang**

Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon. Definisi tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Adapun arti kata ulang menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu lakukan lagi; kembali seperti semula.<sup>16</sup> Dengan demikian definisi pemungutan suara ulang adalah proses pemberian suara yang dilakukan lagi oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon.

## **2. Syarat Pemungutan Suara Ulang**

Terkait syarat pemungutan suara, diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015. Pada bab XV Pasal 112 Ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan terbukti terdapat (1) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan /atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, hlm. 1520

Selain dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, syarat Pemungutan Suara Ulang (PSU) juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Pada Pasal 59 Ayat (1) pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan /atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.



Selain keadaan yang dimaksud di atas, dalam Peraturan KPU juga menambahkan ketentuan terkait waktu penyampaian hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas. Ketentuan yang dimaksud sebagai berikut: <sup>17</sup>

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 hari setelah pemungutan suara.
- (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana pada Ayat (1) kepada KPU/KIP kabupaten/Kota.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dalam keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud Ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dimaksud.
- (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari hari setelah pemungutan suara.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan saksi kepada pasangan calon untuk hadir dan menyaksikan pemungutan Suara Ulang di TPS.

Adapun terkait tahapan, program, dan penjadwalan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

---

<sup>17</sup> Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2015

## **C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah**

### **1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945**

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 24C Ayat (1), bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>18</sup>

Jika diuraikan, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ada 4 yaitu:

- a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

---

<sup>18</sup> Lihat juga Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.131

## **2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah**

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan penetapan perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Adapun ketentuan tersebut sebagai berikut:

- (1) Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional;
- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- (4) Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota kepada Mahkamah Konstitusi;
- (5) Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Ayat (4) paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud Ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan keputusan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- (7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud Ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- (8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan;
- (9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Ayat (8) bersifat final dan mengikat;

- (10) KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan dalam Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara penetapan hasil perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah sebelum dibentuknya badan peradilan khusus.

#### **D. Pedoman Beracara di Mahkamah Konstitusi dalam Hal Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur definisi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu menurut doktrin, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terdiri dari Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>19</sup> Namun pada bagian ini penulis membatasi pembahasan, dengan fokus pada pedoman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terkait Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta, hlm.14

Sehubungan dengan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah yang diberikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, maka dianggap perlu menetapkan aturan pelaksana. Aturan pelaksana yang dimaksud Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dengan pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain:

#### **1. Para pihak dan Objek**

Para pihak dalam perselisihan hasil pemilihan adalah;

a. Pemohon;

Pemohon yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga), yaitu:<sup>20</sup>

- Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

---

<sup>20</sup> Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

b. Termohon;

Termohon yang dimaksud adalah penyelenggara yang mempunyai kewenangan mengeluarkan penetapan hasil perolehan suara pada pemilihan Kepala Daerah. Adapun penyelenggara pada tingkat Provinsi yaitu KPU/KIP Provinsi, sedangkan penyelenggara pemilihan pada tingkat Kabupaten/Kota adalah KPU/KIP Kabupaten/Kota.<sup>21</sup>

c. Pihak terkait;

Salah satu ciri pihak terkait yang berkepentingan langsung, yaitu pihak yang ditentukan sebagai pemenang, mempunyai hak-hak procedural dalam mempertahankan keputusan KPU yang menguntungkannya. Dengan hak-hak prosedural demikian, pihak terkait memiliki hak untuk menyanggah permohonan pemohon dan berhak untuk memberikan bukti-bukti lawan terhadap bukti-bukti yang diajukan pemohon.<sup>22</sup>

Pihak terkait yang dimaksud adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan

---

<sup>21</sup> Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

<sup>22</sup> Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.179

mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.<sup>23</sup>

d. Objek

Adapun objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang memengaruhi terpilihnya pemohon.<sup>24</sup>

## **2. Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Pihak terkait**

a. Permohonan Pemohon;

Dalam hal pengajuan permohonan, terdapat beberapa ketentuan terkait perbedaan perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

(1) Wilayah provinsi

- Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan permohonan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon;
- Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan permohonan dapat dilakukan jika terdapat

---

<sup>23</sup> Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

<sup>24</sup> Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon;

- Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan permohonan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon;<sup>25</sup>

## (2) Kabupaten/Kota

- Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon;
- Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon;
- Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon;
- Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon;<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

<sup>26</sup> Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015



b. Jawaban Termohon

Jawaban diberikan oleh termohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah sidang panel atau sidang pleno untuk pemeriksaan pendahuluan terhadap masing-masing permohonan pemohon selesai dilaksanakan. Adapun isi muatan dalam jawaban termohon antara lain nama dan alamat termohon, uraian yang jelas bahwa keputusan termohon terkait penetapan hasil pemungutan suara yang diumumkan oleh termohon telah benar, dan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguatkan keputusan termohon tentang penetapan hasil perolehan suara pemilihan sudah benar. Selain itu jawaban termohon juga dilengkapi dengan alat bukti.<sup>27</sup>

c. Pihak terkait

Keterangan pihak terkait diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 (dua) hari setelah sidang panel atau sidang pleno untuk pemeriksaan pendahuluan terhadap masing-masing permohonan pemohon selesai dilaksanakan. Adapun keterangan pihak terkait berisi beberapa poin diantaranya, uraian yang jelas bahwa pihak terkait adalah peserta pemilihan yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan, permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguatkan penetapan

---

<sup>27</sup> Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

termohon terkait perolehan suara hasil pemilihan sudah benar, serta pihak terkait melengkapi keterangannya dengan alat bukti.<sup>28</sup>

### **3. Pemeriksaan perkara**

#### **a. Pemeriksaan pendahuluan**

Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan untuk mendengarkan penjelasan pemohon mengenai pokok permohonan. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan dalam sidang panel atau sidang pleno sejak 3 (tiga) hari setelah permohonan pemohon dicatat dalam BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) dalam tenggang waktu 6 (enam) hari.<sup>29</sup>

#### **b. Pemeriksaan persidangan**

Pemeriksaan persidangan dilaksanakan dalam sidang panel. Sidang panel atau sidang pleno tersebut dilaksanakan setelah sidang panel atau sidang pleno untuk pemeriksaan pendahuluan. Adapun pemeriksaan persidangan meliputi:<sup>30</sup>

- (1) pemeriksaan pokok permohonan,
- (2) permohonan alat bukti tertulis,
- (3) mendengarkan keterangan pemohon, termohon dan pihak terkait,
- (4) mendengarkan keterangan saksi,
- (5) mendengarkan keterangan ahli,
- (6) pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, dan
- (7) pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara

---

<sup>28</sup> Pasal 19 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

<sup>29</sup> Pasal 25 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

<sup>30</sup> Pasal 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

elektronik dengan alat optik atau alat bukti yang serupa dengan alat bukti itu.

c. Alat bukti

Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil pemilihan berupa:

(1) Surat atau tulisan

Alat bukti surat yang dimaksud adalah bukti surat yang terkait langsung dengan objek perkara perselisihan hasil pemilihan yang dimohonkan kepada Mahkamah konstitusi dan keabsahan dalam memperolehnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Alat bukti surat atau tulisan terdiri atas:<sup>31</sup>

- Keputusan termohon tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan beserta lampirannya;
- Keputusan termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan beserta lampirannya;
- Berita cara dan salinan pengumuman hasil pemungutan dan penghitungan suara dari TPS;
- Berita acara penyampaian hasil penghitungan perolehan suara dari KPPS kepada PPS;
- Berita acara penyampaian hasil penghitungan suara dari PPS kepada PPK;
- Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dari PPK;
- Berita acara penyampaian hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP kabupaten/kota;
- Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dari KPU/KIP kabupaten/kota;
- Berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP kabupaten/kota kepada KPU/KIP provinsi;
- Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi;

---

<sup>31</sup> Pasal 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

- Berita acara dan salinan keputusan hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota;
- Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Dokumen tertulis lainnya.

#### (2) Keterangan para pihak

Alat bukti berupa keterangan para pihak disampaikan dalam persidangan.<sup>32</sup>

#### (3) Keterangan saksi

Alat bukti berupa keterangan saksi adalah keterangan dari saksi yang ditugaskan secara resmi oleh pemohon dan pihak terkait, serta keterangan saksi yang berasal dari pemantau pemilihan yang bersertifikat. Selain itu, Mahkamah dapat memanggil saksi lain untuk didengar keterangannya.<sup>33</sup>

#### (4) Keterangan ahli

Alat bukti berupa keterangan ahli disampaikan oleh ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang dihadirkan oleh para pihak dalam persidangan. Akan tetapi ahli tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya. Mahkamah juga dapat mendatangkan ahli lainnya untuk didengarkan keterangannya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

<sup>33</sup> Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

<sup>34</sup> Pasal 34 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

#### (5) Alat bukti lainnya

Alat bukti lain yang dimaksud berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat itu.<sup>35</sup>

#### (6) Petunjuk

Alat bukti petunjuk yang dimaksud adalah hasil pengamatan hakim terhadap 2 (dua) atau lebih alat bukti yang memiliki persesuaian antara satu sama lain atas objek perkara hasil pemilihan.<sup>36</sup>

#### d. Keterangan pihak lain

Dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah Konstitusi dapat memanggil badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan/atau jajarannya secara berjenjang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan/atau jajarannya secara berjenjang, dan/atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu, baik atas inisiatif mahkamah ataupun permintaan dari para pihak untuk didengarkan keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa.<sup>37</sup>

#### e. Persidangan jarak jauh

Mahkamah Konstitusi dapat menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi video conference

---

<sup>35</sup> Pasal 35 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

<sup>36</sup> Pasal 36 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

<sup>37</sup> Pasal 38 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

untuk pemeriksaan perkara. Persidangan jarak jauh ini diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan Mahkamah.<sup>38</sup>

f. Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Putusan sela tersebut dikeluarkan jika dipandang perlu oleh Mahkamah.<sup>39</sup>

#### **4. Putusan Mahkamah**

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat para hakim. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat bulat, maka pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak. Jika dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut dicantumkan dalam putusan.<sup>40</sup> Ada 3 jenis amar putusan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah yaitu:<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

<sup>39</sup> Pasal 40 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

<sup>40</sup> Pasal 41 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

<sup>41</sup> Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

- Permohonan tidak dapat diterima, apabila permohonan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- Permohonan ditolak, apabila permohonan terbukti tidak beralasan;
- Permohonan dikabulkan, apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh termohon, serta menetapkan penghitungan suara yang benar.

Sidang pleno untuk pengucapan putusan Mahkamah dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak perkara dicatat dalam BRPK (Buku Register Perkara Konstitusi).<sup>42</sup> Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 43 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015.

<sup>43</sup> Pasal 44 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>44</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015. Serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meneliti dasar hukum

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada ; Jakarta, 2014, hal.14.



pengulangan pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah, serta pertimbangan hakim dalam memerintahkan pengulangan pemungutan suara ulang.

- pendekatan kasus (*case approach*), penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan pemungutan suara ulang yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Seperti kasus yang terjadi di Muna dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 120/PHP.BUP-XIV/2016, kasus di kabupaten Mamberamo dengan nomor perkara 24/PHP.BUP-XIV/2016, serta di Kabupaten Halmahera Selatan dengan nomor perkara 1/PHP.BUP-XIV/2016 Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan sehingga dapat menunjang argumentasi penulis dalam memecahkan masalah hukum yang diangkat penulis.

### **C. Bahan Hukum**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber penelitian berupa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011), hlm. 93.

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau mengikat. Yang terdiri atas :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - c. Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.
  - d. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.
  - e. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

f. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas literatur-literatur dan makalah-makalah, karya-karya ilmiah, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan diolah dan dianalisis sehingga diperoleh hasil mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer maupun sekunder yang telah diharmonisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Alasan Mahkamah Konstitusi Memerintahkan Melakukan Pemungutan Suara Ulang**

Pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai syarat Pemungutan Suara Ulang. Adapun syarat Pemungutan Suara Ulang yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika terdapat gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau hasil penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Selanjutnya pada Ayat (2) diatur bahwa Pemungutan Suara dapat diulang jika dari hasil pemeriksaan dan penelitian Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan terbukti terdapat 1 atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

## **A.1. Kabupaten Muna**

### **a. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada penyelenggara pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muna (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS. Perintah tersebut dikeluarkan melalui putusan sela. Oleh Karena itu, pada bagian ini penulis akan melihat Putusan Sela Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna dengan Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016.

Pemohon pada pokoknya memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Termohon dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan yang benar sesuai penghitungan Pemohon, atau memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di 12 TPS.

Adapun alasan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa terjadi perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dan Termohon. Pada hasil perhitungan yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon berada di peringkat kedua, sedangkan setelah Pemohon melakukan perhitungan suara, Pemohon berada pada peringkat pertama.<sup>46</sup> Menurut Pemohon selisih

---

<sup>46</sup> Penetapan hasil penghitungan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing paslon sebagai berikut:

- Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) : 47.434 (Suara Terbanyak ke-2)
- Pasangan Nomor Urut 2 : 5.408 (Suara Terbanyak ke-3)
- Pasangan Nomor Urut 3 : 47.467 (Suara Terbanyak ke-1)

suara Pemohon tersebut pada pokoknya disebabkan oleh pengurangan suara atau surat suara dan juga terjadi penambahan suara atau surat suara di beberapa TPS. Selain itu Pemohon juga menemukan fakta bahwa pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Muna Tahun 2015 pada pokoknya berlangsung tidak jujur serta banyak terjadi kecurangan seperti pemilih yang melakukan pencoblosan ganda, Pemilih yang menggunakan formulir C6 milik orang lain, ataupun penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) 2 hari menjelang Pemilihan.<sup>47</sup>

Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan beberapa pertimbangan hukum terhadap permohonan pemohon. Namun dari sejumlah permohonan hanya 2 (dua) permohonan Pemohon yang oleh MK dianggap beralasan menurut hukum, yaitu pada paragraph [3.14.1] terkait lebih dari seorang pemilih yang melakukan pencoblosan ganda di beberapa TPS dan pada paragraf [3.14.3] terkait penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) 2 hari menjelang hari pemilihan. Pemohon juga menyertakan bukti-bukti dalam rangka memperkuat permohonannya.

---

Sedangkan berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

- Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) : 47.503 (Suara Terbanyak ke-1)
- Pasangan Nomor Urut 2 : 5.408 (Suara Terbanyak ke-3)
- Pasangan Nomor Urut 3 : 47.398 (Suara Terbanyak ke-2)

<sup>47</sup> Lihat Putusan Sela 1 Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, hlm.18-126.

Berdasarkan dalil Pemohon pada paragraf [3.14.1], Mahkamah kemudian mempertimbangkan sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan dari saksi Pemohon La Ode Amrin memang benar terdapat pencoblosan ganda yang dilakukan oleh Drs. Hamka Hakim dan istrinya yang bernama Marlina D, yaitu di TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan kemudian berpindah memilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Panwas Kabupaten Muna para terlapor (Drs. Hamka hakim dan Marlina D) mengakui telah melakukan pencoblosan di dua TPS yang berbeda yakni TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu. Di samping itu, dalam klarifikasi terhadap Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Raha I atas nama Muh. Zulkifli, dan Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki atas nama Hasrin, keduanya mengakui dan membenarkan adanya warga atas nama Drs. Hamka Hakim dan marlina D yang mencoblos dua kali;
3. Bahwa terhadap fakta di atas Termohon dan Pihak Terkait tidak membantahnya;
4. Bahwa Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 menyatakan bahwa:  
“(2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:  
...  
d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama ataupun TPS yang berbeda; dan/atau  
...”
5. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, menurut Mahkamah telah terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Drs. Hamka Hakim. Dan Marlina D, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) huruf d *a quo*, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki kecamatan Katobu, sehingga menjadi beralasan untuk dilakukan

---

<sup>48</sup> Ibid, hlm.241-243.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan bukti kedua pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih yang sah di salah satu dari dua TPS tersebut. Oleh karenanya, menurut mahkamah, dalil Pemohon a quo sepanjang mengenai penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki kecamatan Katobu beralasan menurut hukum;

Sedangkan untuk dalil Pemohon pada paragraf [3.14.3] Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Bahwa saksi Munir menerangkan yang bersangkutan menerima 16 lembar SKTT dari Kepala Desa marobo yang bernama la Ode Bou untuk dibagikan kepada warga desa Wabunrese, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;
2. Bahwa saksi Boy selaku salah satu warga desa Wabunrese, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, yang menerima SKTT dari saksi Munir (mertuanya) tersebut, menggunakan SKTT tersebut untuk memilih di TPS 1 Desa Marobo. Saksi juga melihat ada 4 (empat) orang warga desa Wabunrese, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah yang juga memilih di TPS 1 Desa marobo dengan menggunakan SKTT tersebut;
3. Bahwa Pasal 112 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa:  
“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:  
...  
e. Lebih dari seorang pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.  
...”  
4. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, menurut Mahkamah telah terbukti terjadi pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih memilih di Kabupaten Muna karena yang bersangkutan adalah penduduk Kabupaten Buton Tengah, sehingga hal tersebut secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (2) huruf e UU 1/2015

---

<sup>49</sup> Ibid, hlm.245-246.



sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015, sehingga menjadi beralasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Oleh karenanya, menurut mahkamah, dalil pemohon a quo sepanjang mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Marobo beralasan menurut hukum;

Kemudian, Mahkamah Konstitusi lebih lanjut memberikan pertimbangan bahwa:<sup>50</sup>

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf [3.14.1] dan paragraf [3.14.3] beralasan menurut hukum, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, serta TPS I Desa Marobo Kecamatan Marobo kabupaten Muna;

Setelah dilakukan pemungutan suara ulang di 3 TPS yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, Termohon kemudian menyampaikan laporan terkait hasil dari PSU tersebut. Selain itu penyelenggara juga menyampaikan laporan secara lisan pada persidangan, meskipun yang disampaikan tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan secara tertulis. Kemudian, terhadap laporan-laporan terkait penyelenggaraan pemungutan suara ulang tersebut, Mahkamah memberikan beberapa pendapat:

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas Mahkamah berpendapat:<sup>51</sup>

1. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PSU Kabupaten Muna pada angka 2 perihal Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan PSU, huruf b, menyatakan yang pada pokoknya pada tanggal 15-16 Maret 2016, Panwas

---

<sup>50</sup> Ibid, hlm.249.

<sup>51</sup> Lihat Putusan Sela 2 Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, hlm.134-135.

Kabupaten Muna melakukan pengawasan terhadap proses validasi faktual/lapangan terhadap DPT, DPTB-1, DPPH, dan DPTB-2 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna bersama saksi atau perwakilan pasangan calon, didampingi oleh pihak Kepolisian dan TNI. Hasil validasi faktual/lapangan ditemukan adanya 174 pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dengan rincian sebagai berikut [vide Bukti PK-1]:

	<b>TPS/Kel/Desa</b>	<b>Temuan</b>	<b>Pemilih</b>
1	TPS 4 Kel. Raha I	Pemilih Ganda Meninggal	34 pemilih 7 pemilih
	Jumlah TMS	41 Pemilih	
2	TPS 4 Kel. Wakamponiki	Pemilih Ganda Meninggal Pindah	63 pemilih 9 pemilih 4 pemilih
	Jumlah TMS	76 pemilih	
3	TPS 1 Desa Marobo	1. Pemilih Ganda 2. Meninggal 3. Pindah 4. Blm cukup umur	23 pemilih 15 pemilih 4 pemilih 15 pemilih
	Jumlah TMS	57 pemilih	
	Total TMS	174 pemilih	

2. Berdasarkan Surat Keterangan Lurah Raha I Nomor 140/16/Rahal/IV/2016 bertanggal 11 April 2016 diterangkan bahwa sebanyak 11 (sebelas) data pemilih tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan Kelurahan Raha I Kecamatan Koatobu Kabupaten Muna;
3. Berdasarkan Surat Keterangan Lurah Wamponiki Nomor 140/12.8/WPK/IV/2016 bertanggal 14 April 2016 diterangkan bahwa sebanyak 6 (enam) data pemilih tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PSU Kabupaten Muna Pasca Putusan MK Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 25 februari 2016 yang

dilakukan oleh Panwas Kabupaten Muna tersebut di atas dan fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah pada hari senin, tanggal 18 April 2016, Mahkamah berkeyakinan bahwa Termohon belum melakukan validasi secara maksimal;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan pada paragraph [3.7] Mahkamah memandang perlu memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang kembali di 2 (dua) TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

Adapun berkenaan dengan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo yang oleh Panwas dilaporkan dilakukan validasi namun tidak terdapat bukti pendukung sebagaimana halnya terjadi di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu sehingga Mahkamah tidak memandang perlu untuk melaksanakan PSU di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo tersebut.

#### **b. Kesimpulan dari pertimbangan hakim**

Dari pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kab. Muna. Pelanggaran tersebut berupa:

- Adanya pemilih ganda
- Penerbitan SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal)

Sedangkan dalam pertimbangan hukum pada putusan sela yang kedua (setelah PSU dilakukan), menurut Mahkamah telah terjadi pelanggaran berupa:

- Adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, jumlah tersebut dibagi ke dalam 4 golongan yaitu; Pemilih ganda, Pemilih yang pindah domisili, pemilih yang telah meninggal, dan pemilih yang belum cukup umur;
- Adanya data pemilih yang tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan di 2 (dua) wilayah, yaitu 11 data di Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu dan 6 data di Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu kabupaten Muna.

Dengan demikian, secara keseluruhan ada 3 jenis pelanggaran yang menjadi pertimbangan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang pada pelaksanaan Pilkada Muna yaitu:

- Adanya pemilih ganda;
- Adanya penerbitan SKTT yang kemudian digunakan oleh warga dari luar kabupaten Muna untuk memilih.
- Adanya data pemilih yang tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan;

## **A.2. Kabupaten Mamberamo Raya**

### **a. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi**

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mamberamo juga mengalami sengketa terkait hasil pemilihan. Sengketa tersebut disebabkan adanya perbedaan hasil penghitungan suara antara Pihak pemohon dan Pihak Termohon. Akibatnya terjadi perbedaan dalam penetapan pasangan calon yang terpilih menjadi kepala daerah. Pihak pemohon merasa dirugikan jika penetapan kepala daerah menggunakan hasil penghitungan suara oleh pihak Termohon. Selain itu menurut Pemohon, terdapat suara yang seharusnya dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh pihak termohon, karena diperoleh dengan cara yang tidak benar oleh pihak terkait.

Setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa permohonan Pemohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya, bukti tertulis, ahli, serta fakta persidangan, Mahkamah menemukan hal-hal berikut:<sup>52</sup>

1. Termohon dan jajarannya tidak membagikan formulir model C-KWK, C1-KWK beserta lampirannya kepada saksi pasangan calon dan juga jajaran Panwas.
2. Ada kesepakatan yang dibuat oleh Pihak Termohon, Pemohon, dan Pihak Terkait berkenaan dengan penyerahan formulir C-KWK dan lampiran model C1-KWK yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor 031/BA-KES/KPU-MBR-030/XII/2015 yang pada pokoknya menyepakati bahwa formulir rekapitulasi C-KWK dan lampiran model C1-KWK akan diserahkan setelah berakhirnya rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Kesepakatan tersebut dibuat pada tanggal

---

<sup>52</sup> Lihat Putusan Sela 1 Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016, hlm.124.

17 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya, tiga saksi pasangan calon dan tanpa ditandatangani oleh Ketua Panwas Kabupaten Mamberamo Raya.

3. Formulir model C1-KWK Plano di Distrik Rufaer untuk TPS 01, TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Fona yang diserahkan oleh Termohon dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2016 tidak berhologram.
4. Ada perbedaan 7 (tujuh) nama anggota KPPS dan saksi dari masing-masing pasangan calon di TPS 02 Kampung Bareri yang tercatat di C1-KWK milik pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
5. Ada perbedaan 1 (satu) nama anggota KPPS di TPS 03 Kampung Fona, yang tercatat di C1 Plano bernama Otto Babisa sedangkan yang tercatat di C-KWK milik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait bernama Otto Faya;
6. Bukti yang dilampirkan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait di TPS 03 Kampung Tayai, formulir C-KWK ditandatangani oleh 7 (tujuh) anggota KPPS namun lampiran C1-KWK tidak ditandatangani oleh 7 (tujuh) anggota KPPS;
7. Ada ketidakkonsistenan tandatangan anggota KPPS antara formulir C1-KWK Plano dengan lampiran formulir C1-KWK yang dilampirkan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yaitu TPS 01 Kampung Tayai, TPS 01 Kampung Bareri dan TPS 01 Kampung Fona.

Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa di Distrik Rufaer pun ternyata ada upaya secara sengaja yang dilakukan oleh jajaran Termohon untuk tidak memberikan Formulir C-KWK, C1-KWK beserta lampirannya kepada saksi pasangan calon dan jajaran Panwas. Menurut Mahkamah tindakan Termohon jelas-jelas telah

melanggar Pasal 98 ayat (12) UU 8/2015<sup>53</sup> dan Pasal 55 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015.<sup>54</sup>

Selain itu, menurut Mahkamah, tindakan Termohon tersebut juga telah melanggar asas pemungutan dan penghitungan suara, khususnya asas jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas dan aksesibilitas.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak yakin apabila dilakukan penghitungan suara ulang akan mendapatkan suara yang benar bagi masing-masing pasangan calon. Menurut Mahkamah, untuk memastikan suara yang benar yang diperoleh masing-masing pasangan calon harus dilakukan pemungutan suara ulang di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer dengan terlebih dahulu melakukan pergantian Ketua dan Anggota KPPS. Menurut Mahkamah, tindakan jajaran penyelenggara pemilihan (KPPS) di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yang tidak independen, Tidak hati hati, melanggar sumpah/janji serta kode etik

---

<sup>53</sup> Diatur bahwa KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksamplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksamplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari.

<sup>54</sup> Pada pasal tersebut diatur bahwa dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (4) sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pada Ayat (4) diatur bahwa KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada Saksi, dan PPL/Pengawasan TPS pada hari pemungutan suara.

penyelenggara pemilihan tersebut pada akhirnya telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada seluruh penyelenggara pemilihan di Kabupaten Mamberamo Raya.

Atas perintah Mahkamah, termohon kemudian melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Setelah itu, hasil dari PSU tersebut dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah kemudian memberikan beberapa pertimbangan setelah menerima laporan terkait pelaksanaan PSU.

Berikut pertimbangan Mahkamah:<sup>55</sup>

[3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati laporan Termohon, laporan Pemohon, laporan Pihak Terkait, serta memeriksa dengan seksama bukti-bukti para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bentuk TPS yang ada, tidak layak dan tidak sesuai dengan syarat penyiapan TPS sebagaimana diatur dalam peraturan KPU dimana disekeliling dinding tertutup rapat oleh daun pohon sagu, tidak ada penerangan, sehingga menyulitkan pemilih untuk pencoblosan.
2. Ada laporan yang disampaikan Pihak Terkait bahwa ada intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian (brimob) terhadap masyarakat di 10 TPS yang akan melakukan PSU sehingga menyebabkan banyak masyarakat pendukung Pihak Terkait di TPS 10 tersebut ketakutan untuk hadir ke TPS sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah suara Pihak Terkait dan hal tersebut terkonfirmasi oleh laporan Kapolda Papua dan Polres Mamberamo Raya.
3. Ada surat perintah dengan nomor Sprin/129/III/2016 tanpa tanggal bulan Maret 2016 dari Kepala Satuan Brimob Polda Papua yang memerintahkan kepada 20 anggota brimob untuk melaksanakan tugas tanggung jawab BKO Polres Mamberamo Raya dalam rangka pengamanan Pilkada ulang di 10 Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya.

---

<sup>55</sup> Lihat Putusan Sela 2 Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016, hlm.111-113.



4. Ada surat dari pasangan calon nomor urut 2 (pemohon) bertanggal 29 februari 2016 tentang Permohonan bantuan keamanan Tim 20 anggota Brimob Polda Papua untuk saksi di 10 TPS dengan tembusan surat kepada Satuan Brimob Polda Papua dimana menurut Polda Papua surat demikian tidak sesuai ketentuan sehingga tidak dapat dipenuhi.
5. Bahwa terkait dengan surat perintah dari Kepala Satuan Brimob Nomor Sprin/129/III/2016 tanpa tanggal bulan Maret 2016 sebagaimana tersebut pada angka 3, Kapolda Papua telah menyampaikan laporan bahwa penerbitan surat perintah tersebut dibuat tanpa meminta izin Kapolda Papua sehingga pengiriman BKO 20 anggota Brimob sebagaimana terlampir dalam surat perintah tersebut adalah tanpa sepengetahuan Kapolda Papua dan untuk itu Kapolda Papua telah mengambil langkah pemeriksaan terhadap personil anggota Bromob dimaksud.
6. Bahwa ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 3 yang bernama Teddy Ayer, Martinus Biday dan Eddy Kogoya yang disampaikan secara tertulis dalam formulir model DB2-KWK-PSU pada saat proses rekapitulasi hasil PSU di tingkat Kabupaten Mamberamo Raya dan formulir laporan model A.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi keberatan terkait adanya intimidasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh oknum aparat yang menyebabkan masyarakat takut datang ke TPS, ada pembongkaran TPS yang dilakukan oleh oknum aparat di TPS 01 Fona dan ada oknum aparat keamanan yang mengambil alih tugas KPPS.
7. Bahwa di TPS 01 Tayai, TPS 03 Tayai, TPS 01 Fona, dan TPS 02 Fona, seluruh anggota KPPS dan saksi pasangan calon tidak menandatangani formulir model C1-KWK dan lampiran formulir model C1-KWK karena disinyalir di TPS tersebut telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat.
8. Di TPS 01 Fona ada berita acara dari PPD Distrik Rufaer yang melaporkan adanya aparat yang membantu membuka kotak suara dan ada catatan keberatan dalam formulir model C2-KWK dari pasangan calon nomor urut 3 yang bernama Marthen Bidai tentang keberatan oknum aparat yang menyebabkan banyak pemilih yang tidak hadir di TPS.

Selanjutnya, Mahkamah memberikan pertimbangan:<sup>56</sup>

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup alasan bagi

---

<sup>56</sup> Ibid, hlm.114-116.

Mahkamah untuk meragukan laporan Termohon, laporan KPU RI, laporan Bawaslu RI, dan laporan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang pada pokonya menyatakan bahwa pemungutan suara ulang berlangsung aman dan lancar.

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan mahkamah sebagaimana diraikan pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa terbukti telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Mamberamo Raya. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh pemohon dengan cara melakukan intimidasi dengan melibatkan oknum aparat Brimob terhadap masyarakat yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang sehingga menurut Mahkamah dalil pihak terkait beralasan menurut hukum.
- [3.6] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, adanya pelibatan oknum aparat kepolisian (in casu 20 oknum anggota Brimob) dalam PSU Kabupaten Mamberamo Raya untuk memenangkan pemohon adalah tindakan yang melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mahkamah konsisten dengan putusan Mahkamah sebelumnya yang tidak memberi toleransi terhadap pelanggaran yang menyebabkan terlanggarnya prinsip-prinsip tersebut.
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, menurut Mahkamah telah terbukti menurut hukum terjadinya pelanggaran serius di 10 TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang yang mencederai prinsip penyelenggaraan pilkada yang demokratis sehingga hasil pemungutan suara ulang tidak mencerminkan suara yang sesungguhnya dari para pemilih. Hal ini secara nyata terlihat dari perolehan suara yang sebagaimana dilaporkan oleh Termohon yaitu di TPS-TPS tempat dilakukannya pemungutan suara uang yang menunjukkan adanya penurunan secara signifikan antara jumlah pemilih sebelum dilaksanakannya PSU dan setelah PSU. Namun dalam hal ini tidak terjadi untuk TPS 01 Kampung Biri dimana tidak terjadi perubahan jumlah pemilih serta hasil yang diperoleh oleh semua pasangan calon baik sebelum maupun sesudah PSU. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat intimidasi, pemilih di TPS 01 Kampung Biri tidak terpengaruh oleh intimidasi tersebut, sehingga hasil pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Biri dimaksud tetap dipandang sah oleh Mahkamah;
- [3.8] Menimbang berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraph [3.6] dan paragraph [3.7] di atas, Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan pemungutan suara ulang kembali di 9 (Sembilan) TPS yaitu TPS 02 Kampung

Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur, TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Fona Distrik Rufaer;

#### **b. Kesimpulan dari pertimbangan Hakim**

Dari pertimbangan hukum di atas, ada beberapa pelanggaran yang kemudian menyebabkan Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan PSU. Pada putusan sela pertama beberapa pelanggaran yang terjadi yaitu:

- Termohon tidak membagikan formulir C-KWK, C1-KWK, dan lampirannya kepada saksi pasangan calon serta Panwas;
- Adanya perbedaan beberapa nama anggota KPPS dan saksi dari masing-masing pasangan calon yang tercatat di C1-KWK milik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Adanya kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon, termohon, dan Pihak Terkait tanpa sepengetahuan Ketua Panwas;
- Adanya lampiran C1-KWK yang tidak ditandatangani oleh anggota KPPS, serta ketidakkonsistenan tandatangan anggota KPPS.

Sementara pada putusan sela yang kedua, Mahkamah menemukan beberapa pelanggaran yaitu:

- Bentuk TPS tidak layak dan tidak sesuai dengan syarat yang diatur dalam peraturan KPU;

- Adanya intimidasi oknum aparat kepolisian;

Dengan demikian, pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pilkada Mamberamo meliputi:

- Termohon tidak membagikan formulir C-KWK, C1-KWK, dan lampirannya kepada saksi pasangan calon serta Panwas;
- Adanya perbedaan beberapa nama anggota KPPS dan saksi dari masing-masing pasangan calon yang tercatat di C1-KWK milik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Adanya kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon, termohon, dan Pihak Terkait tanpa sepengetahuan Ketua Panwas;
- Adanya lampiran C1-KWK yang tidak ditandatangani oleh anggota KPPS, serta ketidakkonsistenan tandatangan anggota KPPS.
- Bentuk TPS tidak layak dan tidak sesuai dengan syarat yang diatur dalam peraturan KPU;
- Adanya intimidasi oknum aparat kepolisian;

### **A.3. Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Pilkada Halmahera Selatan**

#### **a. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi**

Pada Pilkada Halmahera Selatan, Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan 2 (dua) putusan sela. Akan tetapi ada sedikit perbedaan. Dimana pada Pilkada Halmahera Selatan, putusan sela pertama

dikeluarkan dalam rangka memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang. Sedangkan putusan sela yang kedua, Termohon diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis memfokuskan pembahasan terhadap putusan sela yang kedua untuk melihat pertimbangan MK dalam memerintahkan PSU.

Berikut pertimbangan Mahkamah:<sup>57</sup>

[3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan laporan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Walikota dan wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati adalah perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan dalam suatu system demokrasi langsung haruslah sesuai dengan prinsip dan konsep pemilu. Dalam hal tersebut, penyelenggaraan Pilkada haruslah berlandaskan pada empat unsur konsep tersebut, yaitu 1) sebagai sarana kedaulatan rakyat; 2) dilaksanakan secara Luber dan Jurdil atau free and fair; 3) dilaksanakan dalam Negara kesatuan RI; dan 4) Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Dengan demikian, dengan berlandaskan pada konsep tersebut, penyelenggaraan pilkada yang demokratis dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas;
2. Bahwa keberhasilan Pilkada sebagai parameter demokrasi bukanlah terletak pada ada atau tidak adanya Pilkada, namun lebih pada kualitas pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Artinya, apabila pilkada itu dijalankan sesuai dengan konsep tersebut di atas, dan dilaksanakan secara free and fair maka demokrasi telah dijalankan dengan baik dalam suatu Negara. Dalam konteks tersebut, apabila sebaliknya dalam penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan dengan cara yang tidak free and fair, sarat dengan berbagai pelanggaran, baik itu tindak pidana Pilkada, pelanggaran administrasi, maupun kesalahan penetapan hasil penghitungan dengan motif pengelembungan suara atau kesalahan

---

<sup>57</sup> Lihat Putusan Sela 2 mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, hlm.67-74.

penghitungan suara, hal tersebut telah menunjukkan bahwa KPU Daerah maupun Bawaslu Daerah tidak mempunyai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, dalam penyelenggaraan Pilkada, sehingga berakibat pada terpilihnya kepala daerah yang diragukan legitimasinya maka pemilihan demikian adalah pemilihan yang tidak demokratis sama sekali.

3. Bahwa hal yang paling penting dalam penyelenggaraan pilkada tidak cukup mengandalkan kemampuan penyelenggara semata. Hal itu memerlukan komitmen semua pemangku kepentingan, khususnya pemilih dan peserta untuk memastikan bahwa proses Pilkada sampai pada tahapan akhir telah diselenggarakan secara berintegritas. Untuk itu, terdapat beberapa aspek yang harus dikawal selama proses rekapitulasi suara yang berjenjang, meliputi integritas penyelenggara, integritas penyelenggaraan, dan integritas hasil pilkada yang ditetapkan.
4. Bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, jelas sekali bahwa penyelenggara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga bukan hanya menciderai demokrasi, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum.
5. Bahwa Mahkamah dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Januari 2016, telah jelas dan tegas memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di Kecamatan Bacan yang mencakup 20 TPS;
6. Bahwa meskipun sesuai dengan keterangan dari pihak terkait telah ditemukannya 26 kotak suara dari PPK Kecamatan Bacan yang berada di toilet SLB Labuha di Desa Tomori, namun dokumen yang terdapat dalam kotak suara tersebut sudah tidak dapat diyakini validitasnya;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Halmahera selatan tahun 2015 maka perlu dilakukan pemungutan suara ulang di 20 TPS di Kecamatan Bacan. Adapun hasil penghitungan suara ulang dari 8 TPS yang telah dilakukan oleh Termohon hasilnya adalah tetap sah, yaitu: 1) TPS 1 Amasing Kali; 2) TPS 2 Amasing Kali; 3) TPS 1 Amasing Kota Barat; 4) TPS 2 Amasing Kota Barat; 5) TPS 2 Hidayat; 6) TPS 2 Labuha; 7) TPS 3 Labuha; dan 8) TPS 5 Labuha, akan ditambahkan dengan hasil Pemungutan Suara Ulang di 20 TPS sesuai dengan amar Putusan ini, yang selanjutnya akan digabungkan menjadi satu kesatuan sebagai hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;

Dari pertimbangan di atas, Mahkamah menganggap bahwa Termohon tidak professional dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dibuktikan dengan hilangnya sebanyak 26 kotak suara. Meskipun kemudian kotak suara yang hilang dapat ditemukan. Akan tetapi Mahkamah menganggap bahwa data yang ada di dalam kotak suara tersebut tidak dapat diyakini validitasnya.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah di wilayah kabupaten Muna, Kabupaten Mamberamo, dan Kabupaten Halmahera Selatan ditemukan fakta bahwa alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melaksanakan PSU dikarenakan terjadi pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada yang meliputi:

- Adanya pemilih ganda;
- Adanya data pemilih yang tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan;
- Adanya penerbitan SKTT yang kemudian digunakan oleh warga dari luar kabupaten Muna untuk memilih.
- Termohon tidak membagikan formulir C-KWK, C1-KWK, dan lampirannya kepada saksi pasangan calon serta Panwas;
- Adanya perbedaan beberapa nama anggota KPPS dan saksi dari masing-masing pasangan calon yang tercatat di C1-KWK milik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

- Adanya kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon, termohon, dan Pihak Terkait tanpa sepengetahuan Ketua Panwas;
- Adanya lampiran C1-KWK yang tidak ditandatangani oleh anggota KPPS, serta ketidakkonsistenan tandatangan anggota KPPS.
- Bentuk TPS tidak layak dan tidak sesuai dengan syarat yang diatur dalam peraturan KPU;
- Adanya intimidasi oknum aparat kepolisian;
- Termohon tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dibuktikan dengan hilangnya sebanyak 26 kotak suara.

Selanjutnya, jika keadaan-keadaan tersebut disesuaikan dengan syarat PSU sebagaimana yang tercantum dalam pasal 112 UU no. 1 Tahun 2015, maka akan terbagi dalam 2 kelompok seperti yang tergambar pada tabel berikut:

No.	Alasan MK memerintahkan PSU yang sesuai syarat dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015	Alasan MK memerintahkan PSU yang tidak sesuai syarat dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015
1.	Adanya pemilih ganda;	Termohon tidak membagikan formulir C-KWK, C1-KWK, dan lampirannya kepada saksi pasangan calon serta Panwas;
2.	Adanya penerbitan SKTT yang kemudian digunakan oleh warga dari luar kabupaten Muna untuk memilih.	Adanya perbedaan beberapa nama anggota KPPS dan saksi dari masing-masing pasangan calon yang tercatat di C1-KWK milik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;



No.	Alasan MK memerintahkan PSU yang sesuai syarat dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015	Alasan MK memerintahkan PSU yang tidak sesuai syarat dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015
3.		Adanya kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon, termohon, dan Pihak Tekait tanpa sepengetahuan Ketua Panwas;
4.		Adanya lampiran C1-KWK yang tidak ditandatangani oleh anggota KPPS, serta ketidakkonsistenan tandatangan anggota KPPS.
5.		Bentuk TPS tidak layak dan tidak sesuai dengan syarat yang diatur dalam peraturan KPU;
6.		Adanya intimidasi oknum aparat kepolisian;
7.		Hilangnya 26 kotak suara

Jadi secara umum, ada 2 jenis alasan Mahkamah dalam memerintahkan PSU yaitu pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 112 dan Pelanggaran yang belum diatur secara tegas dalam UU.

## **B. Alasan Mahkamah Konstitusi Tidak Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang.**

### **B.1. Kabupaten Muna**

#### **a. Pertimbangan Hakim**

Setelah PSU yang ke-2 kalinya dilaksanakan, selanjutnya Termohon kembali menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan PSU tersebut

kepada Mahkamah Konstitusi. Laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah guna melihat apakah dalam penyelenggaraan PSU sudah berjalan dengan benar serta tidak terjadi kecurangan yang menyebabkan mencederai nilai demokrasi.

Pada pokoknya Termohon menyampaikan bahwa penyelenggaraan PSU yang ke-2 berjalan lancar, aman, dan tertib walaupun terjadi pengusiran terhadap Komisioner KPU yang sedang bekerja di meja help desk oleh sekelompok massa dengan alasan yang irasional.<sup>58</sup> Adapun tanggapan terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara yaitu pasangan calon nomor urut 1 (pemohon) menerima hasil tersebut, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 dan 3 menolak hasil suara tersebut.<sup>59</sup>

Pihak terkait menyampaikan alasan terkait penolakan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon. Keterangan tersebut disampaikan dalam bentuk tulisan dan ditambahkan dengan keterangan lisan dalam persidangan hari Selasa tanggal 18 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Bahwa terhadap pelaksanaan PSU tanggal 19 Juni 2016, dimana pelaksanaannya jauh lebih buruk dari PSU dan pelanggaran-pelanggarannya memang ada yang mirip dengan pelaksanaan PSU sebelumnya, misalnya masih ada pemilih ganda terutama di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, ditemukan banyak “pemilih yang tidak memenuhi syarat”, tetapi tetap menggunakan hak pilihnya. Untuk yang tidak memenuhi syarat diklasifikasi dalam 4 hal yaitu pemilih yang berasal dari luar kabupaten Muna; pemilih yang

---

<sup>58</sup> Lihat Putusan Akhir dengan Nomor perkara 120/PHP.BUP-XIV/2016, hlm.242.

<sup>59</sup> Ibid, hlm.245.

<sup>60</sup> Ibid, hlm 249.

berasal dari Kelurahan Wamponiki; pemilih yang identitas kependudukannya sudah mati atau sudah tidak sah, atau tidak berlaku lagi dan pemilih yang sudah pindah domisili;

2. Bahwa adanya *money politics*, kemudian penghalang-halangan, intimidasi terhadap Paslon nomor Urut 3, adanya dugaan intervensi dari tim Paslon Nomor Urut 1 kepada termohon dalam proses pelaksanaan PSU, serta ada fakta baru yang ditemukan yaitu ada dugaan bahwa Calon Wakil dari Paslon Nomor Urut 1 itu memiliki identitas ganda. Karena dalam laporan atau permohonan yang diajukan ke MK, yang bersangkutan menggunakan KTP Jakarta. Sementara yang bersangkutan juga pada PSU Kedua ikut memilih di TPS 4 kelurahan Raha I;
3. Bahwa terkait dengan keluarnya atau pengusiran salah satu anggota KPU kabupaten Muna yang bertugas di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, karena adanya desakan oknum, dan juga dibantu dengan aparat kepolisian, kemudian akhirnya dikeluarkan dari TPS. Padahal yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas yang sangat penting yaitu meng-crosscheck data-data pemilih;
4. Bahwa terkait laporan dengan register nomor 01/LP/PILKADA/VI/2016, Pihak Terkait melampirkan bukti klarifikasi yang di bawah sumpah di bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, khusus untuk nama Muhammad Nursyam dan Rahmawati. Keduanya memang mengakui bahwa mereka memiliki identitas atau domisili di Kota Kendari, ditunjukkan dengan KTP dan KK. Artinya, mereka memang awalnya berdomisili di Kabupaten Muna, tetapi telah mengajukan pemindahan, surat pemindahan. Yang kemudian sekarang berdasarkan KK dan KTP yang mereka miliki itu saat ini mereka berdomisili di kota kendari. Kemudian pemilih atas nama Muhammad Sobirin, pihak terkait telah melakukan crosscheck data di dinas kependudukan dan catatan sipil, memang benar bersangkutan terdaftar di kabupaten Buton Utara, bukan di kabupaten Muna. Kemudian untuk pemilih atas nama Egi Olviana, Pihak Terkait menemukan data bahwa yang bersangkutan berasal dari Kabupaten minahasa Utara;
5. Bahwa pihak terkait menemukan ada sekitar 24 (dua puluh empat) pemilih yang sebenarnya tidak memenuhi syarat kemudian ikut memilih khususnya di TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
6. Bahwa pihak terkait meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi paslon Nomor Urut 1 atas nama LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul malik Ditu, M.Si, membatalkan hasil pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Wwamponiki Kecamatan Katobu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten

Muna Tahu 2015 dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2016, bertanggal 21 juni 2016, dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu;

Terhadap laporan tersebut Mahkamah kemudian memberikan beberapa pertimbangan. Berikut pertimbangan Mahkamah:<sup>61</sup>

- [3.3] Menimbang bahwa setelah mahkamah membaca dan mencermati laporan dari Termohon, keterangan dari Pemohon, keterangan dari Pihak Terkait, laporan KPU RI, laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, serta memeriksa dengan seksama bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-48, memeriksa bukti Termohon yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-78, memeriksa bukti Pihak Terkait yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-185, memeriksa bukti Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-58, memeriksa lampiran laporan KPU RI, serta berdasarkan keterangan para pihak sebagaimana telah diuraikan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2016, telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) kedua di 2 (dua) TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu kabupaten Muna.

Bahwa berdasarkan keterangan tertulis Hasil Pengawasan Pemungutan Suara ulang Kabupaten Muna pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 12 Mei 2016, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam keterangan tertulisnya pada huruf C (Uraian singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran), pada angka 1 (Pelanggaran administrasi Pemilihan) menyatakan yang pada pokoknya bahwa selama pengawasan pelaksanaan PSU TPS 4 kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Bawaslu Provinsi Sulawesi tenggara tidak menemukan dugaan pelanggaran Pemilu selama tahapan PSU.

Namun demikian, Pihak terkait telah melaporkan pelaksanaan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilihan yang berdasarkan validasi administratif dan faktual dinyatakan

---

<sup>61</sup> Ibid, hlm.262.

“belum/tidak ditemukan” atau “tidak memenuhi syarat (TMS)”. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilih atas nama Egy Olviana, rahmawati, Muh. Nursyam, dan Muhammad adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Muna tanggal 9 desember 2015 maupun pada DPT pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tanggal 22 Maret 2016;
  2. Bahwa Pemilih atas nama Egy Olviana, Rahmawati, Muh. Nursyam, dan Muhammad Shobirin adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki yang berdasarkan hasil pencermatan dan validasi faktual dinyatakan Belum Memenuhi Syarat;
  3. Bahwa Pemilih atas nama Egy Olviana, Rahmawati, Muh. Nursyam, dan Muhammad Shobirin menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Wamponiki pada tanggal 19 Juni 2016 dengan terlebih dahulu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kabupaten Muna di meja *Help Desk*. Setelah proses klarifikasi dan *cross-check*, kepada 4 (empat) pemilih tersebut diberikan C6.Ulang KWK untuk digunakan memilih.
- [3.4] Menimbang bahwa terhadap persoalan “Pemilih Ganda” dan “Kartu Tanda Penduduk Ganda” sebagaimana terungkap dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2016, menurut Mahkamah kedua hal tersebut merupakan persoalan yang berbeda. Bahwa pemilih ganda adalah yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dalam satu kegiatan pemilihan. Hal tersebut merupakan pelanggaran dalam Pilkada, sedangkan kartu tanda penduduk ganda adalah setiap penduduk yang memiliki KTP lebih dari satu. Hal yang demikian merupakan persoalan administrasi kependudukan, sehingga terkait dengan persoalan kartu tanda penduduk ganda yang didalilkan oleh Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, sedangkan dalil-dalil lain yang diajukan Pihak Terkait selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan;
- [3.7] Menimbang bahwa demi memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muna dapat

berjalan, maka Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara a quo sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini.

#### **b. Kesimpulan dari Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah, bahwa dalam pelaksanaan PSU tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu. Hal tersebut sesuai dengan laporan dari Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Tenggara. Adapun keberatan yang disampaikan Pihak terkait mengenai “Pemilih yang tidak memenuhi syarat”, dianggap bukanlah sebuah pelanggaran dikarenakan pemilih tersebut dapat memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kabupaten Muna di meja *help desk*. Adapun terkait KTP ganda (identitas ganda) yang dimiliki oleh salah satu pasangan calon merupakan persoalan administrasi. Sehingga menurut Mahkamah alasan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum.

### **B.2. Kabupaten Mamberamo**

#### **a. Pertimbangan hakim**

Setelah dilakukan pemungutan suara ulang seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah, selanjutnya Termohon, menyampaikan laporan terkait pelaksanaan PSU. Menurutnya pelaksanaan PSU pada umumnya berjalan dengan baik dan lancar. Akan tetapi dari pihak Pemohon menganggap masih terjadi beberapa pelanggaran berupa:

1. Adanya penggantian anggota KPPS di beberapa TPS yang dilakukan oleh Termohon;

2. Adanya proses pengamanan yang tidak berjalan sesuai kesepakatan;
3. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses Pihak Terkait dan anggota KPPS terhadap saksi Pemohon dan laporan keberatan yang dilakukan oleh saksi Pemohon yang tidak ditanggapi oleh Termohon dan Bawaslu serta selalu diarahkan untuk diselesaikan di MK.

Terkait adanya keberatan tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap adanya proses penggantian beberapa anggota KPPS yang dilakukan oleh Termohon, menurut Mahkamah, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Termohon dengan mempertimbangkan segala aspek serta kondisi riil setempat dan Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran dalam pengantian anggota KPPS tersebut. Mahkamah memahami kendala yang dialami oleh Termohon terkait sumber daya manusia yang ada di kampung yang akan melakukan proses pemungutan suara ulang. Lagipula berdasarkan laporan dari Pemohon sendiri dan juga termohon proses penggantian tersebut tidak secara menyeluruh melainkan hanya beberapa anggota KPPS.
2. Bahwa terhadap pelaksanaan pengamanan yang dilakukan oleh Kapolres Mamberamo Raya dalam PSU kedua tersebut, menurut Mahkamah dengan memperhatikan berbagai kendala yang dialami oleh Kapolres Mamberamo raya sebagaimana yang dilaporkan Kapolres Mamberamo Raya, proses pengamanan yang dilakukan oleh Kapolres Mamberamo Raya dengan berkoordinasi dengan Kapolda Papua dan Dandim Sarmi adalah upaya maksimal yang dapat dilakukan oleh Negara terhadap proses pengamanan dalam pelaksanaan PSU kedua tersebut. Hal penting yang menjadi penilaian Mahkamah adalah terkait dengan netralitas aparat yang melakukan pengamanan terhadap proses pelaksanaan PSU tersebut. Adanya laporan yang runtut dan rinci dari Bawaslu Provinsi Papua dan Kapolres Mamberamo Raya membuat keyakinan Mahkamah bahwa dalam pelaksanaan PSU kedua ini tidak ada tindakan yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan yang dilakukan diluar perintah dan koordinasi dari Kapolda Papua dan juga Kapolres Mamberamo raya. Keadaan ini berbeda dengan keadaan sebelumnya yaitu pada saat dilaksanakannya PSU

pertama dimana ada keterlibatan aparat keamanan yang bertindak tanpa sepengetahuan Polda Papua.

3. Bahwa terkait dugaan adanya intimidasi yang menurut Pemohon dilakukan oleh saksi Pihak Terkait dan oknum anggota KPPS sehingga menyebabkan saksi pemohon tidak dapat masuk ke TPS dan terhadap pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terdapat alat bukti yang benar-benar meyakinkan Mahkamah bahwa berbagai pelanggaran tersebut benar-benar terjadi dan dilakukan secara masif dengan tujuan memenangkan Pihak Terkait karena belum ada bukti yang sah yang ditetapkan oleh Sentra Gakkumdu yang mempunyai kewenangan untuk menindak lanjuti dan memberi putusan terhadap laporan pelanggaran. Dengan mengingat kondisi geografis serta jarak yang cukup jauh dari ibukota Provinsi Papua, bahkan dari ibukota kabupaten, yang hanya bias ditempuh dengan helikopter dan hanya beberapa TPS yang dapat dijangkau dengan *speedboat*, Mahkamah berpendapat bahwa sesungguhnya Bawaslu telah melakukan upaya maksimal untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran.

[3.4] Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat hal dan keadaan baru yang signifikan yang diajukan oleh Pemohon yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa itu akan mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil-dalil keberatan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.6] Menimbang bahwa demi memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Raya dapat berjalan, maka Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara a quo sebagaimana yang dimuat dalam bagian amar putusan ini

#### **b. Kesimpulan dari Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah tidak memerintahkan PSU dikarenakan dalil-dalil keberatan Pemohon tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum.



### **B.3. Kabupaten Halmahera Selatan**

#### **a. Pertimbangan Hakim**

Laporan Termohon terkait penyelenggaraan PSU pada pokoknya menyatakan bahwa proses pemilihan berjalan secara aman, lancar, jujur, dan adil. Tidak ada kejadian khusus yang menunjukkan adanya pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan ataupun pelanggaran lainnya yang menimbulkan proses pemungutan suara ulang dihentikan. Hal tersebut juga terlihat dari semua saksi pasangan calon yang hadir di 20 TPS, tidak seorangpun yang mengajukan keberatan dan saksi-saksi membubuhkan tanda tangan.<sup>62</sup>

Akan tetapi berbeda halnya dengan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon. Menurut pemohon pada pokoknya penyelenggaraan pemilihan masih terjadi banyak pelanggaran termasuk keberpihakan penyelenggara kepada salah satu pasangan. Hal itu dikuatkan dengan diterbitkannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan putusan terhadap KPU kabupaten Halmahera Selatan dengan Nomor 22/DKPP-PKE-V/2016 dan Nomor 23/DKPP-PKE-V/2016 tertanggal 1 Maret 2016.<sup>63</sup>

Menanggapi hal tersebut Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Lihat putusan akhir dengan nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, hlm.93

<sup>63</sup> Ibid, hlm.96.

- [3.5] Menimbang bahwa terkait persoalan perolehan suara di kecamatan lain sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam keterangan tertulis dan keterangan lisannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 6 April 2016, hal dimaksud merupakan dalil baru yang tidak pernah dipersoalkan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 tersebut sebelumnya oleh pihak terkait, sehingga karenanya dalil pihak terkait dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.
- [3.6] Menimbang terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, tanpa mengecilkan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut bagi kematangan demokrasi, Mahkamah menilai terhadap pelanggaran tersebut tidak ada bukti lebih lanjut yang bernilai hukum bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara signifikan sehingga pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Namun, jikapun pelanggaran tersebut ada, tetap dapat ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang.
- [3.7] Menimbang bahwa demi memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan dapat berjalan maka Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara a quo sebagaimana yang dimuat dalam bagian amar putusan.

#### **b. Kesimpulan dari Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperoleh alasan Mahkamah tidak memerintahkan PSU kembali adalah :

- Mahkamah menganggap bahwa keberatan terhadap pelaksanaan PSU yang disampaikan oleh pihak terkait dianggap merupakan dalil baru yang tidak dipersoalkan sebelumnya. Sehingga mahkamah memilih untuk tidak mempertimbangkan keberatan yang disampaikan oleh pihak terkait.

- Pelanggaran yang terjadi tidak memiliki alat bukti yang bernilai hukum serta tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Setelah menguraikan pertimbangan hakim di daerah-daerah tersebut, secara umum diperoleh alasan Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan PSU adalah:

- Keberatan yang disampaikan tidak beralasan menurut hukum;
- Pelanggaran yang terjadi tidak dapat dibuktikan.

Terhadap putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah baik di Kabupaten Muna, Mamberamo, maupun Halmahera, penulis kemudian menilai beberapa hal di dalamnya diantaranya adalah:

Pertama, dalam hal Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di Kabupaten Muna sudah tepat, karena Mahkamah menemukan fakta yang memenuhi syarat untuk dilakukannya PSU sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Akan tetapi ketika penulis membandingkan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah pada putusan sela tersebut, penulis menemukan adanya perbedaan.

Pada putusan sela yang pertama angka [3.14.2], beberapa dalil pemohon ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satunya dalil terkait adanya lebih dari satu pemilih yang menggunakan Formulir C6 milik orang lain. Menurut Mahkamah, dalil pemohon tersebut hanya asumsi pemohon

yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum. Padahal pada bagian duduk perkara, Pemohon telah memaparkan terkait pemilih yang menggunakan formulir C6 KWK milik orang lain. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Ketua Panwaslu yang menemukan pemilih atas nama Hasbar, Lukman Syarifuddin, dan Asnindar melakukan pencoblosan di TPS dengan menggunakan formulir C6 KWK milik orang lain. Ketiga orang itupun mengakui perbuatannya.

Menurut penulis, terkait adanya keterangan Ketua Panwas mengenai ditemukannya beberapa orang yang menggunakan formulir C6 KWK milik orang lain, hendaknya MK mencari kebenaran tentang keterangan tersebut dengan cara MK dapat memanggil dan mendengarkan keterangan langsung dari ketua Panwas dalam pemeriksaan persidangan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 38 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2015 bahwa Mahkamah dapat memanggil Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan/atau jajarannya secara berjenjang, Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan Umum (DKPP) dan/atau jajarannya, dan/atau pihak-pihak yang perlu dipandang perlu, baik atas inisiatif Mahkamah maupun atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang diperiksa. Hal itu dibutuhkan untuk mengetahui apakah benar telah terjadi hal seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Jika kemudian Panwas tidak membenarkan ataupun tidak mampu

membuktikan apa yang telah dikemukakan, maka tidak ada perubahan terhadap konsekuensi dari pertimbangan Mahkamah tersebut. Akan tetapi jika Panwas membenarkan hal tersebut maka konsekuensinya adalah Mahkamah harus memerintahkan PSU di TPS tempat pelanggaran itu terjadi. Hal tersebut sesuai dengan syarat untuk melakukan PSU yang diatur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 huruf e. Artinya keterangan Panwas tersebut dapat berpengaruh terhadap jumlah TPS yang diperintahkan oleh MK untuk melaksanakan PSU.

Berbeda halnya dengan dalil pemohon pada paragraf [3.14.1] terkait pemilih ganda, dimana Mahkamah dalam pertimbangannya terlebih dahulu mendengarkan keterangan Panwas. Kemudian keterangan Panwas tersebut dijadikan sebagai fakta persidangan serta salah satu alasan MK dalam memerintahkan PSU.

Selain itu, ketika Mahkamah ingin mengetahui apakah keadaan yang terjadi memenuhi syarat untuk dilakukan PSU atau tidak memenuhi syarat, Mahkamah dapat terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari Panwas. Adapun keterangan Panwas yang didengarkan oleh Mahkamah Konstitusi harus berasal dari keterangan Panwas Kecamatan. Hal ini didasarkan pada pasal 112 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 bahwa *“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan....dst”*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rekomendasi

dari Panwas Kecamatan sangat dibutuhkan dalam setiap keputusan Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu di Kabupaten Mamberamo, penulis menemukan bahwa salah satu pertimbangan MK untuk memerintahkan PSU adalah terkait bentuk TPS yang tidak layak. Akan tetapi ketika Pemohon kembali mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan PSU dengan dalil yang sama beserta bukti terkait keadaan TPS yang tidak layak, Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan PSU bahkan keadaan tersebut tidak dimasukkan dalam bagian pertimbangan hukum putusan MK. Ditambah dengan tidak adanya penjelasan lebih lanjut yang disampaikan MK terkait tindakan yang tidak menerima keberatan pemohon padahal keberatan yang didalilkan sama seperti pada putusan sela yang sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan Mahkamah Konstitusi kurang konsisten dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan pada kasus yang sama maupun pada putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh MK.

Kedua, soal pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan PSU dengan menambahkan keadaan-keadaan yang tidak diatur dalam UU sebagai syarat PSU, serta menganggap bahwa keadaan-keadaan tersebut bertentangan dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Menurut penulis ada baiknya Mahkamah Konstitusi fokus pada keadaan-keadaan yang telah diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU nomor 1 Tahun 2015 sebagai syarat PSU. Jika kemudian Mahkamah Konstitusi menetapkan keadaan-keadaan lain

diluar yang telah ditetapkan pasal 112 UU no. 1 Tahun 2015 pada saat yang bersamaan putusan tersebut menciptakan keadaan hukum baru. Dengan demikian, keadaan-keadaan tersebut kemudian dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pelaksanaan PSU. Dalam konteks itu, perlu diperhatikan pernyataan hakim Ketua John Marshall bahwa teks harus dipahami dari pengertian aslinya, bukan dipelintir atau distigmatisasi sesuai dengan agenda interpretator. Begitu pula pernyataan Lord Bacon bahwa *cum reditu a liter, judex transit in legislatorum* (ketika hakim menyimpang dari yang tersurat, dia sebetulnya telah menjadi legislator).<sup>64</sup>

Ketiga, terkait pertimbangan MK yang menolak keberatan yang disampaikan dengan alasan tidak terdapat bukti, menurut penulis sebaiknya Mahkamah menjelaskan maksud keadaan tidak terdapat bukti. Selain itu penulis juga menemukan beberapa keberatan yang disampaikan akan tetapi tidak dijadikan bahan pertimbangan bagi MK. Seperti yang terjadi di Halmahera Selatan saat pemohon menjadikan surat keputusan DKPP sebagai alat bukti yang menjatuhkan putusan KPU. Padahal jika mengacu pada pasal 38 PMK no. 1 Tahun 2015 maka keputusan DKPP tersebut dapat dijadikan keterangan lain sebagai pemberi informasi terkait permohonan yang sedang diperiksa.

Keempat, jika merujuk pada pertimbangan hakim angka [3.6] pada putusan akhir di Halmahera selatan, menurut penulis terdapat

---

<sup>64</sup> Adnan Jamal, 2009, *Konfigurasi Politik dan Hukum Institusionalisasi Judicial Review di Indonesia*, Pustaka Refleksi: Makassar, hlm.213

pelanggaran-pelanggaran yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum lainnya. Seperti yang terjadi di kabupaten Mamberamo, tindakan penyelenggara yang melanggar pasal 98 ayat 12 UU 8/2015 dan pasal 55 ayat 7 PKPU No. 10 Tahun 2015, kemudian dijadikan sebagai alasan untuk memerintahkan PSU kurang tepat. Karena jika merujuk pada aturan tersebut maka tindakan tersebut semestinya diselesaikan melalui jalur hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam UU 8/2015.

Kelima, jika mengacu pada pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 menurut penulis penyelenggaraan PSU dimungkinkan jika terjadi keadaan seperti bencana alam yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan. Begitu juga pada ayat selanjutnya bahwa PSU dapat dilaksanakan dalam hal terbukti penyelenggara tidak netral serta terbukti pemilih melaksanakan haknya tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Selain itu, PSU merupakan sebuah upaya dalam optimalisasi demokrasi pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan Pemungutan Suara Ulang tidak terikat pada syarat yang telah ditetapkan dalam pasal 112 UU No. 1 Tahun 2015. Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan lain, oleh karena itu penulis mengelompokkan alasan MK tersebut ke dalam 2 kelompok yaitu Alasan yang sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam pasal 112 UU no. 1 tahun 2015 dan Alasan yang tidak sesuai dengan syarat dalam pasal 112 UU No. 1 Tahun 2015. Secara umum alasan yang tidak sesuai syarat tersebut merupakan keadaan yang dianggap oleh MK bertentangan dengan asas-asas pemilihan kepala daerah. Selain itu penulis menemukan pertimbangan hakim yang tidak konsisten dalam memutus perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muna, Mamberamo, dan Halmahera Selatan.
2. Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan PSU dikarenakan Keberatan yang disampaikan tidak beralasan menurut hukum, dan Pelanggaran yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Akan tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait keadaan-keadaan tersebut sehingga tidak jelas alasan MK dalam memberikan pertimbangan

sebelum menjatuhkan putusan yang menyebabkan muncul ketidakpuasan bagi salah satu pihak.

## **B. Saran**

1. Seyogyanya Mahkamah Konstitusi hendaknya dalam memerintahkan Pemungutan Suara Ulang mengacu pada keadaan-keadaan atau syarat yang telah diatur dalam Pasal 112 UU No. 1 Tahun 2015 agar ada yang dijadikan pedoman atau dasar untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Selain itu, Mahkamah Konstitusi hendaknya memperhatikan Konsistensi dalam memberikan pertimbangan, karena berdasarkan yang penulis uraikan terdapat keadaan-keadaan yang sama akan tetapi Mahkamah memberikan putusan yang berbeda. Terkait alasan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan PSU yang tidak sesuai syarat pada UU No. 1 Tahun 2015, penulis memberikan saran agar Mahkamah Konstitusi tetap mengacu pada syarat yang diatur dalam pasal 112 UU no 1 tahun 2015 dengan cara memberikan penafsiran terhadap keadaan-keadaan yang ada dalam pasal tersebut.
2. Seyogyanya Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya memberi penjelasan lebih detail atau lebih rinci, sehingga dapat diketahui alasan dan aturan yang dijadikan pedoman oleh MK sebelum dibentuknya lembaga peradilan khusus yang diamanatkan oleh UU no. 1 Tahun 2015 untuk mengadili sengketa perselisihan hasil

pilkada. Selain itu, mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat hendaknya Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan menguraikan secara detail sehingga memberikan kepuasan kepada para pihak, baik pemohon, termohon, serta pihak terkait. Sebab tidak ada lagi upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Mukthie Fadjar. 2013. *Pemilu dan Demokrasi*. Setara Press: Malang.

----- . 2016. *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*. Setara Press: Malang.

Adnan Jamal. 2009. Konfigurasi Politik dan hukum Institusionalisasi Judicial Review di Indonesia. Makassar; Pustaka Refleksi.

Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Universitas Indonesia Press: Jakarta.

Departemen Pendidikan. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Setara Press: Malang.

Jimly Asshiddiqie. 2012. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika: Jakarta.

Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Rahmat Hollyzon MZ dan Sri Sundari. 2015. *Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna*. Bestari: Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

#### **Internet**

[www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=5](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=5), diakses pada 23 Januari 2017, Pukul 21.14 WITA